

RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2018



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KOTA BEKASI

Jl. Jend A. Yani No. 1 Bekasi, Jawa Barat, Telp. 8896 1767 Fax. (021) 8895 9980
Website : diskominfo.bekasikota.go.id, Email : kominfo@bekasikota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Buku Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018 dapat kami selesaikan. Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi ini merupakan salah satu acuan dalam melaksanakan tugas Walikota Bekasi yang didelegasikan kepada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui Buku Rencana Kerja ini, diharapkan dapat menggambarkan rencana kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi pada Tahun 2018, sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2018.

Akhirnya kami berharap Buku Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi ini dapat diimplementasikan dan bermanfaat sebagai panduan perencanaan kerja tahunan.

Bekasi, Januari 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI



Dr.dr. TITI MASRIFAHATI, MKM., MARS.

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19650214 199103 2 005

DAFTAR ISI

<i>Cover</i>	<i>i</i>
<i>Kata Pengantar</i>	<i>ii</i>
<i>Daftar Isi</i>	<i>iii</i>
<i>Daftar Tabel</i>	<i>iv</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT	
DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 Analisis Kerja Pelayanan PD.....	23
2.1.1 Fungsi Kepala Dinas.....	23
2.1.2 Uraian Tugas Kepala Dinas.....	23
2.1.3 Susunan Organisasi dan Struktur Organisasi.....	27
2.2 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	30
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	31
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	35
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	36
3.3 Program dan Kegiatan.....	38
BAB IV Penutup	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Struktur Organisasi Diskominfostandi	28
Tabel 2.2	Jumlah ASN Diskominfostandi 2018	29
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfostandi Kota Bekasi	9
Tabel 2.4	Rencana Program dan Kegiatan	32
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2018 dan Prakiraan maju Tahun 2019	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja perangkat daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam system perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan terlaksananya kualitas pelayanan publik yang lebih baik.

Pada saat ini Pemerintah Kota Bekasi sedang bergerak cepat dalam melakukan implementasi Teknologi Informasi untuk memperbaiki kinerja manajemen pemerintahan, atau sering disebut sebagai E-Government. Tantangan besar dalam implementasi E-Government terletak pada proses penyeimbangan pencapaian hasil jangka pendek sekaligus focus pada wawasan strategis di masa depan. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik serta Persandian Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan

Persandian Kota Bekasi merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Teknologi Informasi di Daerah. Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013-2018, yaitu "**Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan**", Dinas Komunikasi, Informatika Kota Bekasi sebagai salah satu Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika Kota Bekasi telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan Perangkat Daerah yaitu Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, Visi Dinas Komunikasi, Informatika Kota Bekasi Tahun 2017-2018 yaitu "**Kota Bekasi yang Informatif, Kreatif, Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi**".

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi tersebut, maka dirumuskan misi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik melalui Peningkatan SDM, Sarana Prasarana Teknologi dan Informasi dalam Rangka Pelayanan Informasi dan Komunikasi kepada Masyarakat serta Promosi Potensi Daerah.

Prinsip-prinsip penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja perangkat daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing perangkat daerah
- c. Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD dan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan KUA-PPAS sampai dengan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja perangkat daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing perangkat daerah;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran dan total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika Kota Bekasi Tahun 2018 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika Kota Bekasi tahun 2018, yang mengarah pada pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta memperhatikan pula program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 / PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten / Kota;
28. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informasi;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 24 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat;
30. Peraturan Daerah Nomor. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018.
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang RPJMD

- Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 tanggal 10 Desember 2013 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi 2005-2025;
 33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2013-2018;
 34. Peraturan daerah Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
 35. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika, serta Statistik dan Persandian.
 36. Peraturan Kota Bekasi Nomor: 81 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor: 79 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Kota Bekasi.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renja oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan persandian Kota Bekasi adalah untuk melaksanakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan prakiraan maju Tahun 2019 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan kedalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah serta menjadi arah kebijakan perencanaan pembangunan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan persandian Kota Bekasi untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Bekasi.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan persandian Kota Bekasi adalah:

1. Sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;
2. Mendeskripsikan program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;
3. Optimalisasi pelaksanaan program-program sesuai dengan yang diharapkan melalui fokus pada program-program prioritas.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Substansi Rancangan Renja Dinas Komunikasi, Informatika Kota Bekasi Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap RKPD.

BAB III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan

Bab ini memuat telahan terhadap kebijakan nasional; Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah; serta program dan kegiatan.

BAB IV Penutup

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta Rencana tindak lanjut.

Tabel 2.1
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
 Perangkat Daerah Dan Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (tahun berjalan)

No.	Rancangan Awal RKPD				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2016 (n-2)			Target Program dan Kegiatan 2017 (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan 2017		Bidang Penanggung Jawab
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2018 (akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015 (n-3)	Target Renja PD Tahun 2016 (n-2)	Realisasi Renja PD 2016 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2017 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)	
1	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Prosentase Pencapaian Road Map E-Goverment	100%		-	-	-				
1.1	Pengelolaan Jaringan TIK Pemkot Bekasi	Jumlah Titik Jaringan	825 titik	-	-	-	-	800 titik, 1 Dok Laporan (12 bulan), 1 tower Jaringan TIK	598.232.355,-	91.80	Bid TIK
1.2	Pembangunan Jaringan TIK SKPD di Pemerintah Kota Bekasi	Terbangunnya Jaringan TIK	4 SKPD	-	-	-	-	1 SKPD	152.420.000,-	76.21	Bid TIK

1.3	Pengelolaan Data Center Pemerintah Kota Bekasi	Pemeliharaan Infrastruktur Data Centre	1 Lokasi	-	-	-	-	1 Data Center	432.923.288,-	86.58	Bid TIK
1.4	Pengelolaan Hotspot Area di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan Ruang Publik	Terkelolanya Hotspot Area di Lingkungan Pemerintah bekasi dan ruang publik	300 Titik AP	-	-	-	-	515 titik AP	939.094.000,-	72.16	Bid TIK
1.5	Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bekasi	Jumlah Pengunjung website	295.000 pengunjung	-	-	-	-	1 website	395.259.260,-	87.84	Bid POIP
1.6	Pengelolaan LPSE	Jumlah paket yang terlayani SPSE Kota Bekasi	2251 paket	-	-	-	-	1301 paket	1.287.371.622	88.78	UPT_LPSE
1.7	Pemeliharaan dan pengelolaan Layanan Informasi digital Kecamatan	Terpelihara dan terkelolanya Layanan Informasi digital Kecamatan	12 Kecamatan	-	-	-	-	12 Kecamatan	186.161.313,-	93.08	Bid e-Gov
1.8	Manajemen Integrasi Data	Terintegrasinya Database	15 database	-	-	-	-	5 database	182.330.000,-	91.17	Bid e-Gov
1.9	Penerapan E Office pada SKPD Pemerintah Kota Bekasi	Diterapkannya E Office pada SKPD Pemerintah Kota Bekasi	16 SKPD	-	-	-	-	6 SKPD	155.700.000,-	77.85	Bid e-Gov
1.10	Pengelolaan Aplikasi Pengaduan Online Kota Bekasi	Terpeliharanya aplikasi POT yang terintegrasi dengan SOROT	1 aplikasi	-	-	-	-	1 aplikasi	182.632.000,-	91.32	Bid e-Gov
1.11	Penataan Jaringan TIK SETDA, BPKAD,	Pemeliharaan dan Penataan Jaringan TIK Kota Bekasi	4 SKPD	-	-	-	-	4 SKPD SETDA, BPKAD, DISNAKER DAN SETWAN	268.645.000,-	89.55	Bid TIK

	DISNAKER DAN SETWAN										
1.12	Pengendalian Penerapan TIK Pemerintah Kota Bekasi	Terkendalikannya Penerapan TIK Pemerintah Kota Bekasi	113 SKPD dan Unit Kerja	-	-	-	-	1 event	606.140.000,-	93.25	Bid e-Gov
1.13	Pemeliharaan dan Pengelolaan Patriot Operation Center	Terpelihara dan terkelolanya Patriot Operation Center	1 lokasi	-	-	-	-	1 lokasi	521.758.411,-	80.27	Bid e-Gov
1.14	Implementasi Pengembangan Kawasan Smart City	Rencana Aksi pengembangan smart city implementasi e health dan e education kawasan, Deteksi dini Banjir dan pengelolaan sampah terintegrasi di kawasan	1 dokumen	-	-	-	-	6 aplikasi	992.140.000	99.21	Bid e-Gov
1.15	Pengelolaan Aplikasi Perizinan E-PATEN website Kecamatan dan kelurahan	pemeliharaan Aplikasi E-PATEN dan website 12 kecamatan dan kelurahan	12 Kec. Dan 56 Kel.	-	-	-	-	-	-	-	Bid e-Gov
1.16	Pengendalian E Government Pemerintah Kota Bekasi	Terkendalikannya pengembangan E Government Pemerintah Kota Bekasi	46 SKPD	-	-	-	-	-	-	-	Bid e-Gov
1.17	Decision Support System analitik	Terbangunnya Decision Support System Analitik	2 aplikasi	-	-	-	-	-	-	-	Bid e-Gov

1.18	Penyusunan standar format metadata (IT Library) SIM/Layanan Berbasis E Gov	Tersusnya standar format metadata (IT Library) SIM/Layanan Berbasis E Gov	1 Dokumen Standarisasi	-	-	-	-	-	-	-	Bid e-Gov
1.19	Pemetaan Application Programe Interface (API) dan ekosisttem interoperabilitas sistem informasi dan layanan berbasis E- Gov Kota Bekasi	pemetaan Application Programe Interface (API) dan ekosistem interoperabilitas Sistem Informasi dan Layanan Berbasis E gov sebagai Design Government Bus System Kota Bekasi	2 Dokumen Pemetaan	-	-	-	-	-	-	-	Bid e-Gov
1.20	Pengembangan Integrated Waste Management Information System (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi) Kota Bekasi	Implementasi manajemen pengelolaan persampahan melalui sistem informasi yang terintegrasi mulai dari sumber hingga akhir (memadukan berbagai elemen kota seperti	1 aplikasi perangkat penunjang	-	-	-	-	-	-	-	Bid e-Gov

		kewilayahan, ruas jalan, kemacetan									
1.21	Pembangunan Jaringan Fiber Optik	Terbangunnya Jaringan Fiber Optik di Kota Bekasi	107 kilo meter	-	-	-	-	-	-	-	Bid TIK
1.22	Tata Kelola Keamanan Informasi	Terkelolanya Keamanan Informasi sesuai Standar ISO 27001:2013	1 Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	Bid TIK
1.23	Pengelolaan alat persandian	Tersedianya Alat Pendukung Utama Operasional Persandian	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	Kabid. Standi
1.24	Pelatihan Pengelolaan dan Perlindungan Informasi berklasifikasi milik pemerintah	Sterilnya Ruang Kepala Daerah, Wakil Kepala daerah dan Kepala Perangkat Daerah	50 ruangan	-	-	-	-	-	-	-	Kabid. Standi
1.25	Penyelenggaraan Layanan Cloud System Kota Bekasi	Jumlah layanan Cloud	1 layanan	-	-	-	-	-	-	-	Bid. TIK

2	Program Optimalisasi Pengelolaan Pos dan Telekomunikasi	Prosentase Tersedianya Pelayanan Informasi	90								
2.1	Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi dan Operator Jaringan Telekomunikasi di Kota Bekasi	Terselenggaranya peralatan telekomunikasi penunjang telekomunikasi yang hnadal sesuai kebutuhan kegiatan operasional di lapangan	8 jenis Alat	-	-	-	-	-	-	-	Bid TIK
2.2	Studi Kajian Perhitungan Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi di Kota Bekasi	Tersedianya Laporan Akhir Kajian Perhitungan Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi sebagai dasar pemungutan retribusi	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	Bid TIK

2.3	Review Cell Plan menara telekomunikasi di Bekasi	Smart system pengolah data dan informasi menjadi sebuah analisa Decision Support System untuk pengambilan keputusan/ kebijakan bukan sistem yang hanya digunakan sebagai alat yang merubah	-	-	-	-	-	-	-	-	Bid TIK
3	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	IKM mengenai pelayanan prima kehumasan SKPD Pemkot Bekasi	100%								
3.1	Penataan Jaringan Radio Telekomunikasi dan Telepon	Tersedianya jaringan telepon Tersedianya faksimili	30 Unit	-	-	-	-	-	-	-	Bid Standi
3.2	Penguatan Operator Transmisi Sandi (OTS)	Jumlah peserta kegiatan dan peserta yang mengikuti Operator transmisi Sandi	60 orang	-	-	-	-	-	-	-	Kabid Standi

3.3	Pembangunan Menara Repeater Dinas Perhubungan	Tersedianya menara repeater, Tersedianya Radio Repeater dan peralatan telekomunikasi tang handal dalam kegiatan operasional dilapangan	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	Bid TIK
3.4	Penguatan Fungsi PPID	Terlaksananya koordinasi Tersedianya buku hasil sengketa informasi	44 SKPD 1 laporan buku tahunan	-	-	-	-	-	-	-	Bid POIP
3.5	Pembinaan Kehumasan	Jumlah peserta kegiatan dan peserta yang mengikuti pembinaan	- 100 anggota bakohumasda	-	-	-	-	-	-	-	Bid POIP
			- 1 keg pekan informasi nasional	-	-	-	-	-	-	-	
			- 1 keg bakohumas regional	-	-	-	-	-	-	-	
			- 1 keg bakohumas nasional	-	-	-	-	-	-	-	
			4 Keg, 1 Keg, 1 Keg, 1 Kali	-	-	-	-	-	-	-	

3.6	Sosialisasi Publikasi Pemilu	Tersedianya informasi tentang pelaksanaan pemilu	18 buah spanduk, 12 kali talkshow radio, 1 kali advertorial, 60 kali spot ilm radio, 1 live event radio, 180 buah foto, 2 buah album, 1000 buah stiker, 100 buah brosur, 3 buah baliho	-	-	-	-	-	-	-	Bid POIP
3.7	Penerbitan Majalah Bekasi Kotaku	Tersedianya majalah Kota Bekasi	3.978 eksemplar	-	-	-	-	-	-	-	Bid POIP
3.8	Pengelolaan Media Center Kota Bekasi Tahun 2017	Pengelolaan, Penataan dan Sarana pendukung Media Centre dan Kliping Surat Kabar	1tahun, pengelolaan Media centre, 2 komputer, 2 printer, 2 Meja komputer dan 110 buku kliping berita	-	-	-	-	-	-	-	Bid POIP
3.9	Pengelolaan Informasi Pemerintah Kota Bekasi	terwujudnya penyebaran informasi melalui media eletronik, radio dan media antar ruang		-	-	-	-	-	-	-	Bid POIP

3.10	Bimbingan Teknis Literasi Media / Literasi Media ke Masyarakat	Jumlah peserta kegiatan dan peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis	60 orang	-	-	-	-	-	-	-	Bid POIP
3.11	Pelatihan Citizen Journalism Kehumasan	Terselenggaranya pelatihan Citizen Journalism	1 Kali	-	-	-	-	-	-	-	Bid POIP
3.12	Studi Rencana Induk Jaringan Telekomunikasi di Kota Bekasi	Tersedianya DED Jaringan Menara Telekomunikasi dan Pergelaran FO (Fiber Optik) di Kota Bekasi	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	Bid TIK
3.13	Pengembangan komunitas jurnalistik	Jumlah aktivitas komunitas dalam mendukung publikasi pembangunan	FGD 3 kali	-	-	-	-	-	-	-	bid POIP
4	Program Pengembangan Data dan Informasi	Prosentase Jumlah Data Primer yang tersedia, tervalidasi									
4.1	Pengelolaan sistem open data kota bekasi	Tersedianya sistem aplikasi open data	1 aplikasi	-	-	-	-	-	-	-	Bid. Standi

4.2	Pengelolaan statistik sektoral berbasis WEB GIS City	Tersedianya data statistik sektoral berbasis WEB GIS City	1 aplikasi	-	-	-	-	-	-	-	Bid. Standi
5	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Prosentase Jenis Informasi Publik yang dipublikasikan	100								
5.1	Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Penyebarluasan Informasi Melalui media elektronik, radio dan media antar ruang	Tersebaranya Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah Melalui Multi Media (media massa 12 x, media interpersonal 12x, media online 365 x)	-	-	-	-	-	-	-	Bid POIP
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan administrasi Kantor									Sekretariat
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya kebutuhan Sarana Komunikasi, Listrik dan Air	6 Jenis Tagihan	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat
6.2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor pada Diskominfo standi Kota Bekasi Sesuai Kebutuhan	63 Jenis	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat

6.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	25 jenis	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat
6.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedia Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	7.000 eks koran, 12 majalah dan 25 buku	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat
6.5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	1.365 box	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat
6.6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terpenuhinya Perjalanan Dinas	220 HOK	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat
6.7	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya jasa piket sandi dan telekomunikasi	1640 HOK	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat
6.8	Penataan Arsip	Pengarsipan dilingkungan diskominfo	1 skpd	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										Sekretariat
7.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	40 Unit	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat

7.2	Pengadaan Meubelair	Terpenuhinya perlengkapan meubelair	151 unit	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat
7.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	280 kali	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat
7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	86 unit	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat
8	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur Negara									Sekretariat
8.1	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Tersedianya Disiplin Aparatur Negara	85 Stel	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat
8.2	Pengadaan Pakaian Hari-hari tertentu	Terpenuhinya sarana dan prasarana pakaian pegawai	85 Stel	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Pengetahuan dan kemampuan Aparatur DiskominfoStandi									Sekretariat

9.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya keikutsertaan Aparatur Sipil Negara dalam pendidikan	60 orang	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD									Sekretariat
10.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan LPPD, LKPJ, evaluasi Kinerja	30 buku, 1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat
10.2	Penyusunan laporan keuangan	Tersusunnya buku laporan keuangan tahunan dinas sebagai laporan pertanggung jawaban	14 buku	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang komunikasi, pelayanan Pos dan Telekomunikasi serta telematika dan Pengelolaan Data Elektronik, yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika, serta Statistik dan Persandian.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik serta Persandian Kota Bekasi Kepala Dinas mempunyai tugas tugas pokok mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang pengelolaan opini dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi, e-government serta statistik dan persandian untuk mencapai visi dan misi Dinas.

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
 - b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
 - c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. pembinaan administrasi perkantoran;
 - e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian serta pelaksanaan hubungan

kerja sama dengan PD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;

- f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Dinas;
- b. menetapkan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Wali Kota;
- c. menetapkan rencana strategis Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Wali Kota;
- d. merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Wali Kota di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- e. merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang pengelolaan opini dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi, e-government serta statistik dan persandian;
- f. menetapkan dan/atau menyampaikan rancangan Prosedur Tetap/ *Standard Operating Procedure* (SOP) di bidang pengelolaan opini dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi, e-government serta statistik dan persandian;
- g. menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis Dinas;

- h. menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas;
- i. menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- j. memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
- k. menyampaikan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan PD kepada PD terkait/Kormonev;
- l. menandatangani dan/atau menyampaikan hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan kepada PD terkait;
- m. menandatangani Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
- n. menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Wali Kota terkait kebijakan-kebijakan strategis bidang pengelolaan opini dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi, e-government serta statistik dan persandian dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di Daerah;
- o. menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkah-langkah inovasi kepada Wali Kota dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan Dinas;
- p. mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan opini dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi, e-government serta statistik dan persandian berkenaan dengan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- q. mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penanganan fungsi urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang meliputi pelaksanaan di bidang pengelolaan opini dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi, e-government serta statistik dan persandian;
- r. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kota/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam

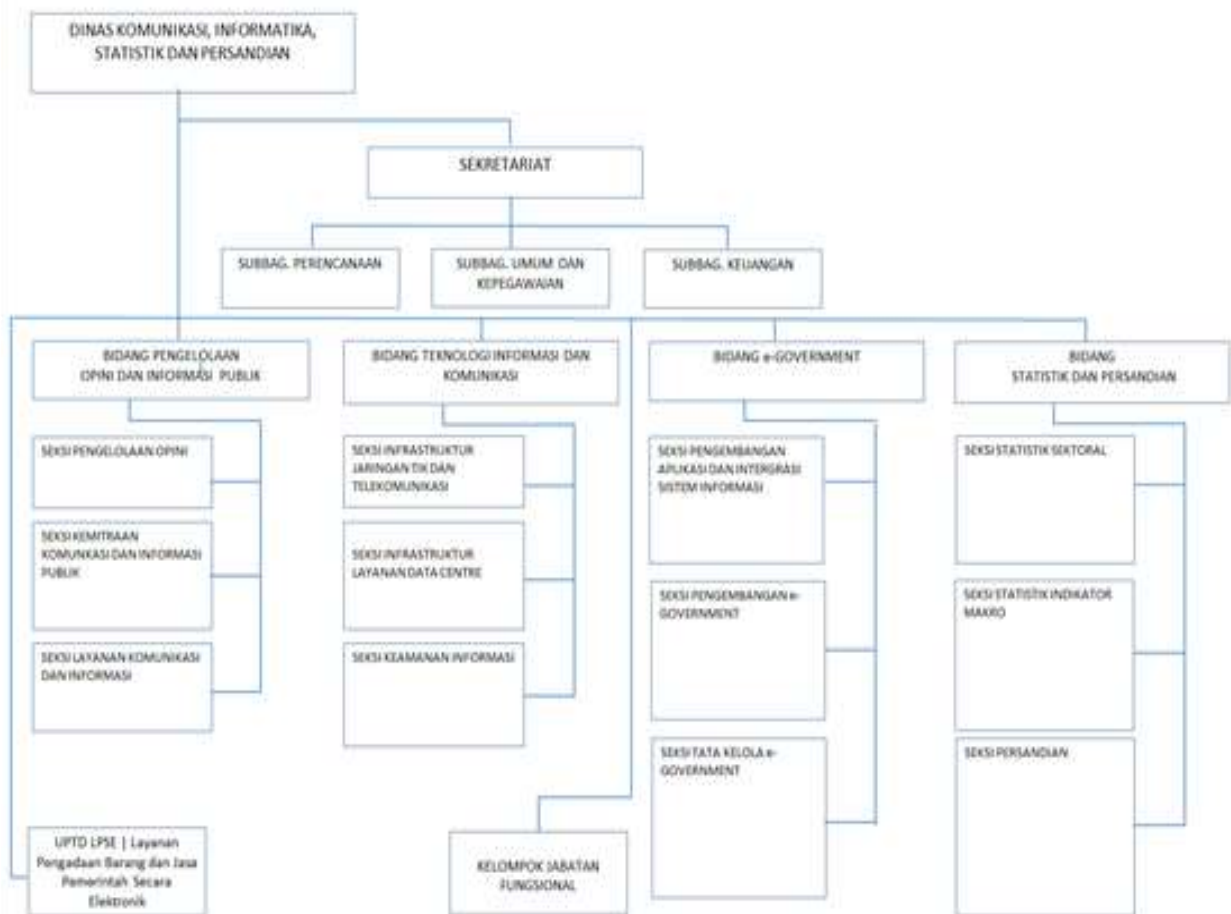
rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah bidang pengelolaan opini dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi, e-government serta statistik dan persandian sesuai kebijakan Wali Kota;

- s. mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Dinas dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya;
- t. membina pengembangan karier bagi staf/bawahan yang berprestasi dan/atau berpotensi;
- u. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap aparatur di lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- v. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- w. menyampaikan laporan kinerja Dinas kepada Wali Kota sesuai pedoman yang ditetapkan;
- x. melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai hubungan kerja Asisten dengan PD, secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- y. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan wewenang jabatannya.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 tentang Tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan persandian Kota Bekasi adalah urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengelolaan Opini dan Informasi Publik, membawahkan:
 1. Seksi Pengelolaan Opini Publik;
 2. Seksi Kemitraan Komunikasi dan Informasi Publik;
 3. Seksi Layanan Komunikasi dan Informasi Publik.
 - d. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahkan:
 1. Seksi Infrastruktur Jaringan TIK dan Telekomunikasi;
 2. Seksi Infrastruktur Layanan Data *Centre*;
 3. Seksi Keamanan Informasi.
 - e. Bidang e-Government, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi;
 2. Seksi Pengembangan e-Government;
 3. Seksi Tata Kelola e-Government.
 - f. Bidang Statistik dan Persandian, membawahkan:
 1. Seksi Statistik Sektoral;
 2. Seksi Statistik Indikator Makro;
 3. Seksi Persandian.
 - g. UPT LPSE;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 79 Tahun 2016 sebagai berikut:



Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi berdasarkan jumlah pada bulan Januari 2018 adalah sebagai berikut:

No	Status	Jumlah
1	PNS	50
2	CPNS	-
3	TKK	44
4	Sukwan	-
Jumlah		94

3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Pelaksanaan peran Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Komunikasi, Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan kepada beberapa tantangan dan permasalahan pokok yang bersumber dari internal lembaga maupun secara eksternal, antara lain:

1. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan komunikasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau e-government yang telah terpasang.
2. Sistem komunikasi yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal.
3. Masih adanya beberapa wilayah di Kota Bekasi yang tidak terjangkau sinyal komunikasi.
4. Kurangnya SDM yang menguasai teknologi informatika guna mendukung pemanfaatan sistem informasi manajemen dan jaringan e-government yang ada.
5. Belum terbentuknya Badan Hukum pada Radio Kota Bekasi sebagai LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal)

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain :

- a) Perbaiki berbagai sarana dan prasarana komunikasi dan media massa mulai dari pusat sampai ke daerah pedesaan sehingga akan mendukung pemerataan distribusi informasi

- b) Peningkatan peranan pos dan telekomunikasi serta media massa melalui pemberdayaan sehingga terjalinnya kerjasama dan keterpaduan langkah dalam penyediaan informasi
- c) Pembentukan pusat-pusat informasi yang dibutuhkan masyarakat serta pemberdayaan kelompok informasi yang tumbuh dari bawah akan sangat membantu makin meratanya pemahaman dan wawasan masyarakat terhadap informasi pembangunan
- d) Perbaiki sistem pengelolaan informasi pembangunan dan penyebarannya melalui pemberdayaan teknologi informasi sehingga terwujud pemerintahan yang berbasis informasi (e-government).

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka pencapaian Visi Pemerintah Kota Bekasi, rumusan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 disusun dengan tema “ Peningkatan Infrastruktur Dasar, Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Bermartabat”. Sebagai upaya mewujudkan tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi dalam pengelolaan Komunikasi dan Informasi serta tugas lain bidang Pemerintahan telah disusun rencana program kegiatan tahun 2018 yang terdiri dari 8 program dan 43 kegiatan.

Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika Kota Bekasi yang terdapat pada RKPD Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini.

TABEL 2.3
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Program	Kegiatan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2		Penyediaan Alat Tulis Kantor
3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5		Penyediaan Makanan dan Minuman
6		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
7		Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran
8		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
9		Penataan Arsip
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
1		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenadaraan Dinas/Operasional
2		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
1		Pengadaan Pakaian Olahraga
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
1		Pendidikan dan Pelatihan Formal
		Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur

V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
1		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2		Penyusunan Laporan Keuangan
VI	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
1		Penerbitan Majalah Bekasi Kotaku
2		Penguatan Operator Transmisi Sandi (OTS)
3		Pengelolaan Media Center Kota Bekasi tahun 2018
4		Bimbingan Teknis Literasi Media / Literasi Media Ke Masyarakat
5		Penguatan Fungsi PPID
6		Pengelolaan Informasi Pemerintah Kota Bekasi
7		
VII	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	
1		Pengelolaan Aplikasi Pengaduan Online Kota Bekasi
2		Pemeliharaan dan Pengelolaan Patriot Operation Center
3		Pengelolaan Jaringan TIK Pemkot Bekasi
4		Pengelolaan Data Center Pemerintah Kota Bekasi
5		Pengelolaan Hotspot Area di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan Ruang Publik
6		Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bekasi
7		Implementasi Pengembangan Kawasan Smart City
8		Pengelolaan LPSE
9		Pengendalian E Government Pemerintah Kota Bekasi
10		Pengembangan Integrated Waste Management System (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi) Kota Bekasi
11		Pembangunan Jaringan Fiber Optik
12		Tata Kelola Keamanan Informasi
13		Pengadaan Alat Pendukung Utama Persandian (APU Persandian) / Pengelolaan Alat Persandian
14		Pelatihan Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah

15		Manajemen Integrasi Data
16		Pemeliharaan Website dan SIM se Kota Bekasi
17		Pelatihan Design Media Pembelajaran Berbasis Multimedia Untuk Guru TIK SMP
18		Pelatihan Pembuatan Aplikasi Program Sistem Informasi dan Administrasi Sekolah Bagi Guru TIK SMP
19		Pengelolaan Informasi Berbasis IT di Dinas Kesehatan
VIII	Program Pengembangan Data dan Informasi	
		Pengelolaan Sistem Open Data Kota Bekasi

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi yaitu Techno Economy, teknologi menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan. Akibat dari kondisi tersebut, salah satu kekuatan bangsa dapat pula diukur dari kemampuan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing. Pembangunan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) merupakan sumber terbentuknya iklim inovasi yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumberdaya manusia, yang pada gilirannya dapat menjadi sumber pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Selain itu iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) menentukan tingkat efektifitas dan efisiensi proses transformasi sumberdaya menjadi sumber daya baru yang lebih bernilai.

Dengan demikian peningkatan kemampuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sangat diperlukan untuk meningkatkan standar kehidupan bangsa dan negara, serta kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia di mata dunia.

Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran Komunikasi melalui Sistem Informasi sangatlah penting. Khususnya harus dapat menjalin proses Komunikasi yang harmonis dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi daerahnya apabila tidak didukung oleh masyarakat begitu juga sebaliknya masyarakat tidak akan mendukung pemerintah, apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu pemerintah Kota Bekasi berupaya memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi dengan seimbang melalui kegiatan dan tugas pokok dan fungsinya.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas Pembangunan daerah Tahun 2017, didasarkan atas Rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi yang dikaitkan dengan sasaran dan Target Kinerja Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi dalam rangka memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari misi yang telah dirumuskan sehingga dapat menggambarkan secara spesifik indikator kinerja keberhasilan, maka dari misi ditetapkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi Tahun 2017, adalah Sebagai berikut:

Misi : Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana Teknologi dan Informasi dalam Rangka Pelayanan Informasi dan Komunikasi kepada Masyarakat serta Promosi Potensi Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sementara Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi tahun 2018 merupakan pelaksanaan operasional tahun pertama dari Renstra di Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi tahun 2017-2018 dan disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2017, berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi tahun 2013-2018, program dan kegiatan indikatif Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi pada tahun 2017 dijabarkan menurut Misi Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi. Secara lebih rinci rumusan rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 dituangkan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2018
 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
 KOTA BEKASI
 NAMA PD : DISKOMINFOSTANDI**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kode				Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
											Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	
			4													
			4	16			Komunikasi dan Informatika									
Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase Layanan Public berbasis E-Government yang terintegrasi	4	16	18		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		Prosentase Pencapaian Road Map E-Government	95%						
			4	16	18	1	Pengelolaan Aplikasi Pengaduan Online Kota Bekasi	Kota Bekasi		Terpeliharanya 1 aplikasi POT SOROT, 300 pengaduan, 50 orang bimtek, 1 server pengaduan online	200,000,000	Pendapatan Daerah				

4	16	18	2	Pemeliharaan dan Pengelolaan Patriot Operation Center	Kota Bekasi		1 lokasi POC	200,000,000	Pendapatan Daerah			
4	16	18	3	Pengelolaan Aplikasi Perizinan SI-PATEN website Kecamatan dan kelurahan	Kota Bekasi		12 kecamatan e-paten, 12 kecamatan website, 56 keluarahan website, 1 unit server e-paten	315,000,000	Pendapatan Daerah			
4	16	18	4	Pengelolaan Jaringan TIK Pemkot Bekasi	Kota Bekasi		terpeliharanya jaringan TIK 825 titik, tersedianya jaringan VPN Mall Pelayanan Publik 2 mb (10 bln), terpeliharanya tower jaringan tik 1 paket, terpeliharanya kabel fiber optik 1 paket, terdokumentasinya hasil audit performance jaringan TIK 1 paket, tersedianya perangkat jaringan radio wireless 1 paket, tersedianya perangkat jaringan TIK 1 paket, terpeliharanya infrastruktur jaringan TIK 1 paket	630,000,000	Pendapatan Daerah			
4	16	18	5	Pengelolaan Data Center Pemerintah Kota Bekasi	Kota Bekasi dan Kota Batam		pemeliharaan fasilitas pendukung data center (1 data center) 12 bln, 1 grounding 12 bln, penempatan DRC (12 bulan)	400,000,000	Pendapatan Daerah			
4	16	18	6	Pengelolaan Hotspot Area di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan Ruang Publik	Lingkungan Kota Bekasi dan Ruang Publik		tersedianya hot spot area di lingkungan Pemkot Bekasi (333 titik AP), tersedianya aplikasi monitoring hotspot (1 aplikasi),tersedianya perangkat monitoring hotspot (7 unit)	1,500,000,000	Pendapatan Daerah			

4	16	18	7	Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bekasi	Kota Bekasi		pengelolaan website bekasikota.go.id (1 website), jumlah pengunjung website 295.000 orang	250,000,000	Pendapatan Daerah			
4	16	18	8	Implementasi Pengembangan Kawasan Smart City	Kota Bekasi		implementasi aplikasi EWS banjir dan aplikasi Epidemologi DBD (2 aplikasi), CCTV (7 titik), 1 paket sensor banjir	725,000,000	Pendapatan Daerah			
4	16	18	9	Pengelolaan LPSE	Kota Bekasi dan Kota Batam		1301 paket pengadaan yang terlayani, terlaksananya pemeliharaan generator listrik (1 kali), tersedianya perangkat penunjang LPSE 13 unit	1,000,000,000	Pendapatan Daerah			
4	16	18	10	Pengendalian E-Government Pemerintah Kota Bekasi	Kota Bekasi		terselenggaranya monev e government (1 dokumen , event wali kota award (1 event))	400,000,000	Pendapatan Daerah			
4	16	18	11	Pengembangan Integrated Waste Management Information System (sistem informasi pengelolaan sampah terintegrasi) Kota Bekasi	Kota Bekasi		terimplementasikan IWMIS yang ditunjang sensor lot (1 aplikasi), CCTV	250,000,000	Pendapatan Daerah			
4	16	18	12	Pembangunan Jaringan Fiber Optik	Kota Bekasi		terbangunnya infrastruktur jaringan fiber optik (76 km)	13,660,000,000	Pendapatan Daerah			
4	16	18	13	Tata Kelola Keamanan Infomasi	Kota Bekasi		(1 dokumen audit), 1 software, (1 dokument assesment), 1 event sosialisasi awareness, 1 event seminar keamanan informasi dan internet sehat	200,000,000	Pendapatan Daerah			

4	16	18	14	Pengadaan Alat Pendukung Utama Persandian	Kota Bekasi		tersedianya jammer (1 unit), terpeliharanya laptop APU (1 paket), terpeliharanya faximili (4 unit), terpeliharanya scanner (1 unit), terpeliharanya komputer (1 unit), terpeliharanya printer (1 unit)	50,000,000	Pendapatan Daerah			
4	16	18	15	Pelatihan Pengelolaan dan Perlindungan Informasi berklasifikasi milik pemerintah	Kota Bekasi		terlatihnya SDM tentang informasi berklasifikasi milik pemerintah daerah (120 orang), terlatihnya SDM tentang informasi sertifikasi elektronik (120 orang)	200,000,000	Pendapatan Daerah			
4	16	18	16	Manajemen Integrasi data	Kota Bekasi		melaksanakan integrated data dengan cakupan 24 database	350,000,000	Pendapatan Daerah			
4	16	18	17	Pemeliharaan Website dan SIM se-Kota Bekasi	Kota Bekasi		terpeliharanya website OPD (47 website), terpeliharanya SIM OPD (10 aplikasi), tersedianya server web dan SIM OPD (1 server)	350,000,000	Pendapatan Daerah			
4	16	18	18	Pelatihan Design media pembelajaran berbasis multimedia untuk guru TIK SMP	Bogor		tersedianya guru TIK SMP yang mampu mendesign media pembelajaran berbasis multimedia (20 orang)	200,000,000	Pendapatan Daerah			
4	16	18	19	Pelatihan pembuatan aplikasi program sistem informasi dan admin bagi Guru SMP	Bogor		tersedianya guru TIK SMP yang mampu membuat aplikasi program sistem informasi dan administrasi (20 orang)	200,000,000	Pendapatan Daerah			

4	16	15	5	Penguatan Fungsi PPID	Kota Bekasi		rakor PPID (60 orang)	150,000,000	Pendapatan Daerah			
4	16	15	6	Pengolaan Informasi Pemerintah Kota Bekasi	Kota Bekasi		111 ilm, 45x talkshow, 8x live event, 30 buah spanduk, 31 baliho, 150 buah banner, 1 kali saik, 1x pertunjukan rakyat, 200 orang	1,000,000,000	Pendapatan Daerah			
4	16	20		Program pengembangan Data dan Informasi		Presentase jumlah data primer yang tersedia, tervalidasi dan terbaru						
4	16	20				Presentase jumlah data sekunder yang tersedia, tervalidasi dan terbaru						
4	16	20	1	Pengelolaan sistem open data kota bekasi	Kota Bekasi		terlatihnya operator pengelolaan sistem open data kota bekasi (70 orang)	150,000,000	Pendapatan Daerah			
3												
3	36			Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan								
3	36	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor	100%					

3	36	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Tersedianya Kebutuhan Sarana Komunikasi, Listrik dan Air	11 bulan sewa internet, 12 rek/bln tipn/fax, 12 bulan frekuensi, 11 bulan tv kabel	2,701,140,000	Pendapatan Daerah			
3	36	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Tersedianya Alat Tulis kantor Pada Diskominfo standi Kota Bekasi Sesuai Kebutuhan	63 jenis	130,000,000	Pendapatan Daerah			
3	36	1	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	25 jenis	104,000,000	Pendapatan Daerah			
3	36	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD		7200 eksemplar koran dan majalah	39,000,000	Pendapatan Daerah			
3	36	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Penyediaan Makanan dan Minuman	1050 box	130,000,000	Pendapatan Daerah			
3	36	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SKPD	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	682 kali	738,036,000	Pendapatan Daerah			
3	36	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi/ Tenaga Perkantoran	SKPD		45 orang x 9 bulan	2,142,000,000	Pendapatan Daerah			
3	36	1	27	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	SKPD	Tersedianya jasa piket sandi dan telekomunikasi	1000 OH	132,470,000	Pendapatan Daerah			
3	36	1	31	Penataan Arsip	SKPD	Pengarsipan dilingkungan diskominfo	1 SKPD	20,000,000	Pendapatan Daerah			

3	36	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%					
3	36	2	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	9 unit kendaraan roda 4, 8 unit kendaraan roda 2	280,000,000	Pendapatan Daerah			
3	36	2	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	107 komputer, 20 laptop, 12 pinter, 6 scanner, 2 fax, 4 mesin tik, 2 finger print, 9 AC	50,000,000	Pendapatan Daerah			
3	36	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatnya Disiplin Aparatur Negara		100%				
3	36	3	6	Pengadaan Pakaian Olahraga	SKPD	Pengadaan Pakaian Olah Raga	100 stel	85,000,000	Pendapatan Daerah			
3	36	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD		100%				
3	36	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 buku	30,000,000	Pendapatan Daerah			
3	36	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan	SKPD	Tersusunnya buku laporan keuangan tahunan dinas sebagai laporan pertanggung jawaban	70 buku	30,000,000	Pendapatan Daerah			

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi Tahun 2018 disusun sebagai pelaksanaan tahun terakhir dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi Tahun 2013-2018. Renja Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Komunikasi, Informatika.

Renja Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi tahun 2018 diharapkan dapat memberikan umpan balik yang positif dalam pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah terhadap upaya pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis pada masyarakat melalui peningkatan keterlibatan para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mewujudkan Good Governance.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi Tahun 2018 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi.

Diharapkan semua elemen kelembagaan Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, dan kinerja pegawai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Bekasi, Januari 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI



Dr.dr. TITI MASRIFAHATI, MKM., MARS.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19650214 199103 2 005